

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BANGKIT BERDAYA DI KECAMATAN TELANAIPURA KOTA JAMBI

Dimas Pratama Putra ¹, Murtir Jeddawi ² & Andi Masrich ³

^{1,2,3}Sekolah Pascasarjana Magister Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
Correspondence Author: dmspratama21@gmail.com

ABSTRACT

Bangkit Berdaya is a program that aims to encourage the accelerated development of neighborhood infrastructure and utilities (RT) in the Jambi City area, as well as encouraging community participation in environmental development. This research was motivated by the research author's interest in the participation of the people of Telanaipura District, Jambi City in the development of infrastructure in the sub-district environment. This research aims to find out how community participation in the rise to empowerment program and determine the factors inhibiting community participation in the rise to empowerment program as well as efforts to overcome the factors inhibiting community participation in the rise to empowerment program in the Telanaipura subdistrict, Jambi City. The theory used is participation theory according to (Eko, 2004:222). The method used in this research is a qualitative research method using a descriptive approach which is intended to understand situations, events, roles, groups or social interactions. Data obtained through literature study, observation, interview documentation. The results of the research show that firstly, the Community Voice which conveys aspirations, ideas, needs, interests and so on through discussion forums in neighborhood units (RT) in sub-districts within the Telanaipura sub-district, Jambi City has been running well. The next access is an arena of meeting point between the community and the government. The government is obliged to open access for the community and provide public services or provide other public infrastructure for the community. There are still sub-districts where community participation in the implementation of the rise to power program has not run optimally. The final control is the community's ability to critically assess policies, both the government and their own community, which have not yet been implemented well.

Keyword: Community Participation, Voice, Access and Control in Implementing the Bangkit Berdaya Program.

PENDAHULUAN

Di Indonesia konsep pembangunan berkelanjutan yang bertajuk pembangunan nasional telah lama dicanangkan demikianlah yang dapat dikenal dengan Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), demikianlah dengan era dewasa ini. Adapun pembangunan nasional disatu sisi telah memberikan hasil yang memuaskan, disisi lain juga masih banyak agenda pembangunan di bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola yang masih tertinggal yaitu, Kemiskinan, ketimpangan, penghidupan ekonomi yang layak, pembangunan perkotaan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan contoh dari agenda pembangunan yang belum terselesaikan, dan sebagai organisasi pelaksana pembangunan nasional dimaksud dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terkadang kebiasaan birokrasi besar cenderung lamban dan kurang resposif terhadap perkembangan dunia, regional, dan nasional. Akibatnya daya saing lemah dan menjadi pemicu kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Artinya kepala

daerah diharapkan dapat menghilangkan kelemahan sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Pudjianto, 2019:23).

Fungsi pemerintahan sendiri terdiri atas empat bagian, pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). (Rasyid, 2022:7) menambahkan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Maka pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga akan mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi. Partisipasi juga dalam pembangunan berarti mendorong kearah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia (Yuwono, 2001 : 124).

Dari hasil laporan realisasi keuangan dan swadaya masyarakat diatas dapat terlihat bahwa masyarakat yang berpartisipasi baik melalui sumbangan warga yang tercantum dari tabel diatas cukup beragam dan sumbangan melalui sarapan pagi dan makan siang untuk warga yang sedang bergotong-royong sendiri menunjukkan bahwa respon masyarakat kelurahan buluran kenali didalam program bangkit berdaya sudah berjalan dengan baik, bahkan antusias masyarakat yang hadir pada saat gotong-royong dari masing-masing RT (rukun tetangga) juga dapat dikatakan sudah berjalan dengan optimal. Tentu hal ini sangat berbeda dengan respon masyarakat kelurahan teluk kenali yang masih minimnya berpartisipasi melalui hadir pada saat pengerjaan program ataupun yang berpartisipasi melalui swadaya konsumsi dan swadaya lainnya.

Penyerapan permintaan akan kebijakan Bangkit berdaya ini tidak berjalan optimal dalam suatu wilayah sebagaimana tonggak awal keberhasilan dari inovasi kebijakan ini adalah partisipasi masyarakatnya, namun jika masyarakatnya saja tidak aktif dan tidak memiliki semangat bergotong royong maka inovasi ini akan mengalami keterhambatan. Pada faktanya kondisi Kota Jambi terus mengalami peningkatan, namun tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu peneliti mencoba menghadirkan sudut pandang yang baru, dimana menempatkan Partisipasi Masyarakat sebagai ujung tombak keberhasilan dari program Bangkit Berdaya. Dimana peran serta masyarakat harus populer dikalangan pembuat kebijakan sehingga bukan hanya pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Disamping itu pemahaman komperhensif tentang masyarakat yang menjadi sasaran serta pelaku kebijakan juga perlu diperhitungkan. Pemerintah harus mengerahkan usaha yang sungguh-sungguh dalam mengembalikan semangat gotong royong yang cenderung memudar dewasa ini apalagi pada masyarakat perkotaan. Sehingga implementasi kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien.

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, peneyelenggaraan negara pada partisipasi masyarakat dan kepentingan rakyat (Ridwan HR, 2014:8).

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi antara lain adalah *voice*, akses dan kontrol (Eko, 2004:222). Pengertian dari masing-masing sekuen-sekuen tersebut di atas adalah: 1) *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah; 2) *Akses*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik; 3) *Kontrol*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

(Davis dan Newstrom, 1989) menyebutkan bahwa salah satu esensi dari partisipasi adalah keterlibatan yang berarti adanya keterlibatan mental dan emosional dibanding hanya aktivitas fisik, sehingga dengan itu maka partisipasi secara sukarela lebih jelas dibanding mobilisasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan kesukarelaan anggota masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan. Diungkapkan oleh (Dusseldorp, 1981), bahwa kesukarelaan masyarakat dalam berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut: a) Partisipasi Spontan, peran-serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik, berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri; 2) Partisipasi Terinduksi, peran-serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik, berupa bujukan, pengaruh, dan dorongan dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi; 3) Partisipasi Tertekan oleh Kebiasaan; peran-serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan seperti yang dirasakan masyarakat pada umumnya. Atau peran-serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat. Jika tidak berperan-serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar; 4) Partisipasi Tertekan oleh Alasan Sosial-Ekonomi; peran-serta yang dilakukan masyarakat, karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian dengan tidak memperoleh bagian dari manfaat hasil kegiatan pembangunan; 5) Partisipasi Tertekan oleh Peraturan, peran serta yang dilakukan masyarakat, karena takut menerima hukuman dari peraturan atau ketentuan yang diberlakukan.

Lebih lanjut Gordon W. Allport berpendapat bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, yang berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Bentuk partisipasi politik warga negara tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Aktivitas-aktivitas politik tersebut dapat berupa keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik, ikut memberikan suara dalam pemilu, dan ikut menduduki jabatan-jabatan baik politik maupun pemerintahan.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan prasarana lingkungan berpegang pada penyampaian kebenaran (*truth*), ketepatan (*appropriateness*), kejujuran/ketulusan (*sincerity*), *transparency*, *equality*, dan kepercayaan (Purba, 2005:86). Ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam pembangunan prasarana diantaranya adalah: 1) Prinsip partisipatif. Harus dipahami bahwa pelaksanaan kegiatan ini bukanlah milik segolongan orang atau kepentingan pihak tertentu saja, tetapi merupakan kepentingan bersama dan merupakan hasil keputusan bersama, yang hasilnya akan

dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang berkepentingan; 2) Prinsip warga sebagai pelaksana, orang luar sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaan kegiatan orang luar harus menyadari bahwa mereka hanya berperan sebagai fasilitator dan bukannya guru, penyuluh atau instruktur serta pelaksana kegiatan tersebut.

Moeljanto menyatakan bahwa dalam konteks partisipasi lokal, semua mitra pelaksana suatu program merupakan persyaratan murni, artinya pelaksanaan harus memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum mereka. Terlepas dari peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi tersebut juga terdorong oleh adanya motivasi tertentu. Motivasi-motivasi yang juga dimaksudkan itu dapat kita lihat pada penjelasan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak sekali ditentukan oleh: a) Kebutuhannya; b) Interest masyarakat; c) Adat istiadat dan sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain.

Menurut (Salusu, 1998:104) "Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu". Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang.

Menyimak penjelasan tersebut maka jelas bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan karena itu merupakan kebutuhan di dalamnya memuat berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah. Interaksi yang dimaksud disini adalah adanya hubungan saling pengertian dan saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa ada hal tersebut maka pembangunan yang merupakan kebijakan pemerintah sulit diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Pandangan lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh (Mubyarto, 1984), "partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri". Keberhasilan pemabangunan nasional pada umumnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Menurut (Muhajir 1980) juga melihat pasrtisipasi dalam empat kegiatan yakni: a) Keterlibatan orang dalam proses pengambilan keputusan; b) Keterlibatan orang di dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan; c) Keterlibatan orang didalam menikmati hasil dari kegiatan; d) Keterlibatan didalam evaluasi suatu progam yang sudah terlaksana.

Sedangkan menurut Ericson dalam (Slamet, 1993) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: 1) Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi (lengkapai di LTBR) pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan aktif dalam mengikuti rapat warga dan juga ikut memberikan usulan, saran dan kritik pada rapat tersebut; 2) Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut; 3) Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyekyang telah dibangun.

METODE PENELITIAN

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Menurut (Creswell 2016:74) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dimana mengkaji mengenai partisipasi masyarakat dalam program bangkit berdaya, serta menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bangkit Berdaya, Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Diantaranya adalah Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bangun Kelurahan Secara Intensif, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk meneliti dan memahami situasi, peristiwa, peran, kelompok atau interaksi sosial tertentu, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Dengan kata lain peneliti akan dapat menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya sehingga dapat disimpulkan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Program Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu atau disebut dengan Program Bangkit Berdaya yang dilaksanakan di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Dimana program ini bertujuan untuk membangun pembangunan yang adil dan merata berdasarkan pembangunan rukun tetangga (RT) didalam wilayah Kota Jambi. Selain itu juga program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilingkungan rukun tetangga (RT) dalam wilayah Kota Jambi. Penelitian ini menggambarkan partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan program bangkit berdaya yang berlokasi di kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Dimana menempatkan partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak dari keberhasilan program ini sebagaimana pelaksanaan program bangkit berdaya Pelibatan masyarakat dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya penelitian ini merujuk pada pendapat Sutoro Eko (2004:222) terkait dengan partisipasi yang dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat mengambil bagian (*take part*) untuk mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah. Partisipasi sendiri tidak hanya melihat keikutsertaan masyarakat didalam pembangunan akan tetapi makna terdalam partisipasi adalah *voice*, akses dan kontrol masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Adapun hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

Voice

Voice merupakan keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya dalam bentuk gagasan, kebutuhan, kepentingan, tuntutan kritik serta saran didalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara garis besar, *voice* adalah sebuah konsep yang ingin memperlihatkan adanya representasi aspirasi warga secara murni tanpa harus terbatas sekat konstituen didalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang

pembangunan dimana proses perencanaan atau Planning dalam suatu kebijakan yang melibatkan peran aktif masyarakat diharapkan menjadi pondasi bagi pemerintah didalam mengakomodir kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Tabel 4.3
Daftar Hadir Musyawarah Pembangunan Kelurahan Buluran Kenali
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
Tahun 2023

No.	Utusan	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir (orang)
		2023	2019
1	Ketua RT 1-19	19	17
2	Bappeda Kota Jambi	1	1
3	Dinas PUPR Kota Jambi	1	1
4	Camat Telanaipura Kota Jambi	1	1
5	TP-PKK Kel. Buluran Kenali	1	2
6	Kabag Pemerintahan Setda Kota Jambi	1	1
7	Ketua LAM Kel. Buluran Kenali Kec. Telanaipura Kota Jambi	1	1
Jumlah		25	45

Hasil Olahan Peneliti, Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa partisipasi masyarakat melalui ketua rukun tetangga yang ada di kelurahan buluran kenali kecamatan telanaipura yang menyampaikan aspirasinya melalui musyawarah pembangunan kelurahan buluran kenali kecamatan telanaipura kota jambi sudah berjalan dengan baik hal ini dapat terlihat sebagaimana jumlah yang hadir pada tabel musyawarah pembangunan di kelurahan buluran kenali kecamatan telanaipura kota jambi.

M. Nurkholis Mursid, SE, ME Selaku Lurah Buluran Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dalam wawancaranya mengatakan bahwa: Untuk kelurahan buluran kenali pada saat musyawarah pembangunan yang dilaksanakan kelurahan seluruh Rukun Tetangga (RT) yang ada di kelurahan buluran diwajibkan untuk hadir. Karena pada saat musyawarah pembangunan pihak kelurahan memang mengundang seluruh OPD terkait baik itu Dinas Pekerjaan Umum, Anggota DPRD Dapil III Kota Jambi, Dinas Pertanian dan lainnya. Karena Musyawarah Pembangunan merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan seluruh aspirasinya terkait pembangunan dan menyapaikan usulan lainnya baik itu fisik maupun non fisik. (wawancara 15 Maret 2024).

Dari hasil wawancara diatas bahwa partisipasi masyarakat didalam proses menyampaikan aspirasi sudah berjalan dengan baik hal ini sebagaimana hasil wawancara diatas. Rizalul Fikri, S.E, M.AP. Selaku Camat Telanaipura Kota Jambi mengatakan bahwa: Di dalam pelaksanaan program bangkit berdaya di kecamatan telanaipura partisipasi masyarakat dan kerjasama antar masyarakat sangatlah dituntut. Partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan program bangkit berdaya sendiri tidak hanya pada level menyampaikan aspirasinya melalui musrembang di tingkat kelurahan akan tetapi masyarakat diharapkan untuk ikut bekerja sama didalam pengerjaan apa yang telah diusulkan masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan memang bantuan didalam program tidak berupa uang ataupun usulan masyarakat akan dikerjakan oleh pihak pemerintah dalam hal ini terkait dengan insfrastruktur jalan

lingkungan misalnya Dinas Pekerjaan Umum, didalam program bangkit berdaya tidak demikian. Akan tetapi bantuan berupa bahan material yang nantinya akan dikerjakan masyarakat secara swadaya dan dikerjakan secara bergotong-royong (wawancara 11 Maret 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat bahwa didalam pelaksanaan program bangkit berdaya partisipasi masyarakat tidak hanya pada level menyampaikan aspirasi saja akan tetapi masyarakat dilibatkan sampai pada tahapan pengerjaan apa yang telah diusulkan masyarakat melalui musrembang. Suhaimi selaku Ketua Lembaga Adat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dalam wawancaranya mengatakan: Adanya program bangkit berdaya ini memang manfaatnya secara langsung sudah dirasakan masyarakat khususnya di kecamatan telanaipura kota jambi, dari undangan yang saya hadiri saya melihat untuk antusias dari masing-masing ketua rukun tetangga yang diundang hampir seluruhnya bahkan seluruhnya menghadiri dan yang menyampaikan terkait dengan apa saja yang menjadi kebutuhan di lingkungan rukun tetangga (wawancara 15 Maret 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat terlihat bahwa partisipasi masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di kelurahan buluran kenali sudah berjalan dengan baik dari masing-masing ketua rukun tetangga yang diundang hampir seluruhnya menghadiri undangan musyawarah pembangunan yang diadakan kelurahan. Yani Selaku Ketua Rukun Tetangga 05 Kelurahan Buluran Kenali menyatakan bahwa: Tentu kami khususnya warga RT 05 memang dari sejak 2018 sangat merasakan dampak yang positif dari program ini, kami warga bisa mengusulkan apa saja yang menjadi kebutuhan warga RT 05 mulai dari pos kamling, renovasi posyandu dan jalan di lingkungan Rt kami, setiap yasinan bulanan atau rapat-rapat RT warga disini selalu kompak menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan pembangunan, dan nanti saya atau perwakilan dari RT bisa menyampaikan pada saat musrembang di tingkat kelurahan. (wawancara 17 Maret 2024).

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa partisipasi masyarakat di kelurahan buluran kenali masih terjaga, yang mana kelurahan tersebut mengadakan pertemuan rutin melalui yasinan ataupun rapat-rapat tingkat RT (rukun tetangga). Warga bisa merembuhkan apa saja yang menjadi kebutuhan di lingkungan RT.

Akses

Selanjutnya akses yang berarti ketersediaan ruang dan kemampuan bagi siapa saja yang terlibat dalam proses pemerintahan. akses yang juga merupakan ruang masyarakat untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan ikut menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Artinya akses merupakan arena titik temu antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itu pemerintah wajib membuka akses bagi masyarakat dan memberikan layanan publik atau menyediakan infrastruktur publik lainnya bagi masyarakat. Sebaliknya masyarakat bersama-sama proaktif mengidentifikasi problem, kebutuhan dan potensi maupun merumuskan gagasan pemecahan masalah di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari.

Didalam penelitian ini Program bangkit berdaya dimaknai sebagai titik temu antara pemerintah dan masyarakat sekaligus respon pemerintah terhadap aspirasi masyarakat didalam pembangunan di lingkungan RT (rukun tetangga) yang ada di kota jambi. sebagaimana yang telah duraikan pada bab sebelumnya program bangkit berdaya bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat di dalam pembangunan lingkungan, Sekaligus mendorong percepatan pembangunan dan utilitas lingkungan yang di kota jambi.

Untuk itu bantuan yang diterima bukanlah berupa uang, namun berupa bahan/material yang nantinya akan digunakan untuk membangun jalan lingkungan, drainase dan program ini juga

mengakomodir pembangunan fasilitas umum seperti, kelengkapan tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya yang ada di lingkungan rukun tetangga (RT) di kota jambi, sebagaimana yang diusulkan oleh rukun tetangga (RT) melalui musyawarah pembangunan di tingkat kelurahan.

Tabel 4.5
Laporan Realisasi Keuangan dan Swadaya dari Masyarakat Kegiatan Bangkit Berdaya Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Tahun 2022

No	Jenis Pekerjaan	RT	Jumlah KK	Pagu APBD (Rp)	APBD	Volume Yang Dibangun	Realisasi Swadaya Masyarakat			Total	Hadir Gotong Royong
							Materi al	Konsums i	Swadaya Lainnya		
1	Kelurahan Teluk Kenali			58.000.000	57.961.824					57.961.824	
1.1	Pembangunan Jalan Setapak	1	89	21.000.000	20.983.959	50 m x 2 m	-	-	-	21.000.000	19 Org
1.2	Pembangunan Jalan Setapak	3	127	18.000.000	17.989.623	(20 m x 2,5 m x 0,15 m) (40 m x 1,5 m x 0,10 m)	-	-	-	18.000.000	33 Org
1.3	Pembangunan Lapangan Bandminton	5	201	19.000.000	18.988.242	14,5 m x 7,5 m	-	-	-	19.000.000	51 Org

Sumber : Dokumen Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Tahun 2022

Dari tabel diatas laporan realisasi keuangan dan swadaya masyarakat didalam program bangkit berdaya yang hadir pada saat pengerjaan pembangunan jalan setapak masih terbilang sangat rendah selain itu juga masyarakat yang berpartisipasi melalui swadaya baik itu material dan swadaya konsumsi ataupun swadaya lainnya bahkan tidak ada satupun masyarakat yang berpartisipasi. Rostini, S.E selaku Sekretaris Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi mengatakan bahwa: Mengenai pelaksanaan program bangkit berdaya ini memang kelurahan Teluk Kenali mengalami permasalahan partisipasi masyarakat terkait program bangkit berdaya sendiri masih minimnya partisipasi masyarakat mengakibatkan kebijakan Bangkit berdaya tidak terlaksana secara optimal. Adanya pengharapan masyarakat akan di beri imbalan baik berupa uang ataupun hadiah ketika telah melaksanakan kebijakan bangkit berdaya, menjadi salah satu faktor penghamabat, kemudian dari usulan pembangunan yang diinginkan masyarakat di lingkungan RT dalam suatu kelurahan, bahkan ada yang tidak ada sama sekali, karena masyarakat di wilayah tersebut masih menganggap bahwa kegiatan pembangunan ini seharusnya di kerjakan oleh pemerintah bukan malah masyarakatnya. (wawancara 18 Maret 2024)

Dari hasil wawancara diatas terlihat adanya perbedaan persepsi masyarakat dengan pemerintah terkait dengan pelaksanaan program bangkit berdaya tersebut yang mana adanya pengharapan masyarakat akan diberi imbalan atau upah. Selain itu juga masyarakat menganggap bahwa kegiatan pembangunan adalah pemerintah bukan masyarakat itu sendiri. Adanya persepsi tersebut tentu ini menjadi salah satu permasalahan yang mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat di kelurahan tersebut. Muslim yang merupakan warga RT 18 Kelurahan Teluk Kenali dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa: Pembangunan itukan kewajiban pemerintah kenapa harus kami yang membangun seperti jalan, dreinase dan lainnya, jika memang kami yang membangun seharusnya ya kami diberi upah karna memang itu kan ada dananya, sementara kami jika ikut mengerjakan pembangunan tentu kami akan meninggalkan pekerjaan kami, yang mana rata-rata kelurahan ini memiliki status pekerjaan sebagai

petani, nelayan dan buruh bangunan, tentu kami mengharapkan adanya sebuah imbalan baik berupa upah ataupun hadiah dari pemerintah. (wawancara 18 Maret 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dicermati bahwa adanya persepsi dari masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan itu kewajiban dari pemerintah.

Tentu persepsi ini memang sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan program bangkit berdaya sendiri, dan juga kondisi mata pencaharian masyarakat, sebagai petani, nelayan dan buruh bangunan membuat waktu untuk menghadiri rapat-rapat pembangunan dan bergotong royong menjadi sedikit.

Zulkifli Muchtar, S.E selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Telanaipura Kota Jambi disampaikan pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa: Terkadang memang ada sebagian wilayah yang beranggapan kalau itu tugas pemerintah, tapi mau gimana lagi dinas PU tidak dapat mengakomodir semua usulan masyarakat apalagi ini pembangunan skala kecil. Untuk itu program bangkit berdaya merupakan jawaban akan hal tersebut, namun sangat disayangkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat. (wawancara 11 Maret 2024). Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa perbedaan pemahaman/persepsi antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan tujuan program bangkit berdaya yang berimbas pada partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan program bangkit berdaya.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan temuan-temuan dilapangan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 1) Partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan program bangkit berdaya di kecamatan telanaipura kota jambi, dapat dikatan sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kelurahan dan RT (rukun tetangga) yang ada dikecamatan telanaipura kota jambi partisipasi masyarakatnya masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya pada musyawarah pembangunan yang diadakan kelurahan, serta rendahnya partisipasi masyarakat yang ikut bergotong-royong pada saat pengerjaan pembangunan ataupun masyarakat yang memberikan swadayanya melalui sumbangan dana ataupun memberikan sumbangan melalui makanan yang masih rendah. Yang mana program ini memiliki konsep pelibatan secara aktif peran masyarakat, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan infrastruktur yang dibangun; 2) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan lingkungan serta adanya persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan merupakan tanggungjawab pemerintah bukan masyarakat. Adanya perbedaan persepsi tersebut merupakan belum optimalnya peran pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan poin-poin penting terkait dengan manfaat yang akan diterima masyarakat melalui program tersebut. Tentu hal ini menjadi rendahnya masyarakat yang berpartisipasi melalui program bangkit berdaya. Disisi lain adanya kesibukan membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi didalam program bangkit berdaya; 3) Selain itu juga aspek kontrol/ evaluasi masyarakat untuk terlibat mengawasi serta melakukan penilaian secara kritis terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) tindakan pemerintah dan Sebaliknya masyarakat juga secara kritis dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka belum berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri Marzali, 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Arifin Rahman, 1998. Sistem politik Indonesia dalam perspektif struktural fungsional, Surabaya.
Boediono, 2007. Metode penelitian kualitatif, Alfabeta, Bandung.

- Isbandi Rukminto Adi, 2003. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Interferensi Komunitas*, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Safitri Ani, 2021. *Grand Inovasi Pemerintahan Daerah (Studi Kebijakan Tentang Program Bangkit Berdaya Kota Jambi*, UIN STS, Jambi.
- Saifudin, 2009. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan*, FH UII Pres, Yogyakarta.
- Sholichin Abdul Wahab, 2008. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono, 2014. *Metode penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif R.N, Cet. Ke-19*, Alfabeta, Bandung.
- W. Gulo, 2002. *Metodologi penelitian*, Rajawali Press, Jakarta.
- Widodo Sigit Pudjianto, 2019. *Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Yulia Agustin Theresia dkk, 2021. *Efektivitas Program Bangkit Berdaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Provinsi Jambi*, *Jurnal Visioner* Vol. 13 No. 1, Jambi.
- Theresia Yulia Agustin, 2021, *Efektivitas Program Bangkit Berdaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi*, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Jefri Candra Putra J, 2018, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kampung Bantar (Bersih, Aman dan Pintar) Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi*, Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Fiqri Fajri 2022, *Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Dan Penilaian Kampung Bersih, Aman Dan Pintar Di Kota Jambi*, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- Chintya Pertiwi 2019, *Implementasi Program Pemerintah Kota Jambi Menuju Bangkit Berdaya*, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Rara Nori Alfiionita 2022, *Perspektif Pelaksanaan Program Bangun Kelurahan Secara Intensif Dan Terpadu Yang Berazaskan Swadaya Kecamatan Kotabaru di Kota Jambi*, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Ani Safitri 2020, *Grand Inovasi Pemerintah Daerah (Studi Kebijakan Tentang Program Bangkit Berdaya Kota Jambi)*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.